MENEROPONG PANGGUNG BELAKANG PLT
H. 07

MELIHAT INFRASTRUKTUR KAMPUS MENDUNIA!
H. 22

SLiLiT ARENA
Jelas & Mengganjal

WAWANCARA EKSKLUSIF REKTOR AL MAKIN

UIN SUKA DAN BUALAN KAMPUS MENDUNIA

EDISI KHUSUS | MEI 2024

Daftar Isi

EDITORIAL

UIN Suka & Bualan Kampus Mendunia 01

LIPUTAN KHUSUS

Sengkarut Keterbukaan Informasi Publik 03

Meneropong Panggung Belakang PLT 07

KANCAH

Rapor Merah Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi 11

WAWANCARA

4 Tahun Menjadi Rektor: Memorabilia, Pengalaman, dan Perjuangan 14

INFOGRAFIK

Carut-Marut UKT di Era Rektor Al Makin 18

SUARA WARGA

Apa Kata Mereka soal Kampus di Era Rektor Al Makin? 20

Apa Harapan Mereka untuk Rektor Baru? 21

FOTO ESAI

Melihat Infrastruktur Kampus Mendunia! 22

CATATAN KAKI

Penjara Mitos di Era Al Makin 26

DITERBITKAN OLEH
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) ARENA
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PELINDUNG: Rektor UIN Sunan Kalijaga | **PEMBINA**: Dr. Fathorrahman S. Ag., M. Si. | **DEWAN PERTIMBANGAN**: Aulia Iqlima Viutari, Dina Tri Wijayanti

PEMIMPIN UMUM: Aji Bintang Nusantara | **SEKRETARIS**: Aliefian Damarizky | **BENDAHARA**: Niswatin Hilma || **PEMIMPIN REDAKSI**: Mas Ahmad Zamzama N. | **REDAKTUR**: Maria Al-Zahra, Selo Rasyd Suyudi, Musyarrafah | **PUSAT ANALISIS DATA**: Nabiel Mumtaz Z., Fauzul Abid | **REPORTER**: Ahmad Fauzi, Yudhistira Wahyu Pradana, Elang Mahardika, Ahmad Ronal Anggoro, Azzam, Nada, Syamsukrandi, Farid, Fatan, Fadlan | **PERUSAHAAN**: Sabrina Zulfiana R., Afrahul Fadilah, Hesti | **ILUSTRATOR**: Nabil Ghazy H., Bisma Ali Hakim, Surya Puja K. | **TATA LETAK**: Aji Bintang N.

Kantor Redaksi: Student Center Lt. 1 No. 1/14 UIN Sunan Kalijaga Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp.: +62 856-4166-6379 (Damar/Sekretaris) | Surel: arena.persma@gmail.com | Situs: lpmarena.com | Instagram: @lpmarena | Twitter: PersMaARENA

Redaksi LPM ARENA mengundang semua kalangan masyarakat untuk mengirimkan tulisan ke alamat redaksi. Pihak yang merasa tidak puas dengan pemberitaan bisa menuliskan hak jawabnya atau kunjungi kantor redaksi guna diskusi lebih lanjut.

WARTAWAN ARENA DIBEKALI TANDA PENGENAL DALAM SETIAP PELIPUTAN, MELAKUKAN KERJA JURNALISTIK SESUAI SOP WARTAWAN ARENA, DAN TIDAK MENERIMA AMPLOP DALAM BENTUK APAPUN.

UIN SUKA & BUALAN KAMPUS MENDUNIA

2024 MENJADI TAHUN TERAKHIR dari apa yang disebut Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Suka sebagai tahap pemantapan, tahap di mana kampus mengembangkan dirinya, dengan satu indikator utama yang jelas: menjadi *World Class University* dalam bidang *Islamic Studies*. Tahap pemantapan ini menjadi kelanjutan dari tahap persiapan pada 2015-2019.

Tahap pemantapan dimulai sejak 2020, tahun di mana Prof. Al Makin mulai menjabat rektor. Dalam konteks itulah mudah dipahami mengapa di masa kepemimpinannya Al Makin mulai menggemborkan jargon "UIN Suka untuk Bangsa, UIN Suka Mendunia" di setiap acara kampus. Cek saja buku "Momong Kampus, Merekatkan Umat dan Membangun Bangsa" yang mengumpulkan pidato rektor selama 2020-2021.

"UIN Suka untuk Bangsa, UIN Suka Mendunia" pun semakin populer. Pejabat-pejabat kampus turut menggelorakan. Mahasiswa wajib mengucapkannya dalam berbagai kegiatan. Kampus terus memproduksi berbagai instrumen kebudayaan dan pengetahuan yang berkaitan ide-ide mendunia. Pada 2022, misalnya, kampus menerbitkan buku "Mendunia Melalui Prestasi". Jargon tersebut pun malah tak ubahnya mitos belaka. Dan produksi mitos acap kali digunakan atas nama kuasa, guna menggembosi seseorang dan buat mengaburkan fakta di baliknya.

Biar pun begitu, sebenarnya tak terlalu terang bagaimana *World Class University* atau Universitas Kelas Dunia itu diukur oleh UIN Suka. Tapi besar kemungkinan, sebagaimana umumnya pemeringkatan kampus, *World Class University* ini diukur dengan akreditasi. Dan memang pada 2022 lalu UIN Suka mendatangkan Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA), salah satu lembaga akreditasi internasional, untuk mengakreditasi hanya 18 dari 69 program studinya.

Lalu, dengan demikian, apakah UIN Suka di 2024 ini sudah mantap menjadi *World Class University*?

Publik bisa menilai sendiri. Yang jelas, akreditasi semacam FIBAA adalah sistem penjumlahan metrik dan angka. Ia tidak menjelaskan bagaimana dan mengapa angka-angka itu ada. Dan menelisik laporan-laporan akademik dan akreditasi kerap rumit dan membutuhkan penjelasan panjang.

Yang bisa dijelaskan tanpa perlu pikir panjang adalah, Universitas Kelas Dunia mana yang membiarkan fasilitas kampusnya terbengkalai; yang tak serius menyediakan lingkungan ramah gender dan inklusif dalam kegiatan belajarnya; yang terang-terangan enggan menyediakan ruang kebebasan bagi civitas akademiknya; yang tidak bisa menciptakan tata kelola kampus yang baik (*good government*) dan transparan; yang terus-terusan menjebak mahasiswa dalam gurita komersialisasi pendidikan?

"Tapi toh akreditasi kita tetap unggul?" sanggah seseorang nun di seberang sana.

Iya, dan sebab itulah sistem akreditasi atau pemeringkatan kerap dikritik karena menanggalkan pengalaman dan kondisi mahasiswa. Artinya, harusnya mutu universitas perlu dilihat dari beragam perspektif. Mutu yang dapat memikul tanggung jawab moral

akademis alih-alih sekadar tanggung jawab administratif.

Untuk itulah, pergantian rektor pada 2024 ini mestinya bisa menjadi momentum refleksi bagi kampus jika tak ingin obsesi-obsesi mendunianya selama ini jatuh pada bualan dan omong kosong semata. Atas nama momentum itu pula ***SLiLiT ARENA*** perlu dihadirkan kembali.

Redaksi

Redaksi ***SLiLiT ARENA*** menerima kritik dan saran terhadap editorial. Silakan kirim ke alamat redaksi ***LPM ARENA*** atau melalui surel arena.persma@gmail.com. Bentuk tulisan utuh 400-700 kata disertai biodata penulis. Nama file ditulis dengan format: Saran/Kritik Editorial_ SLiLiT ARENA.

SENGKARUT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

oleh **Ahmad Zamzama N.**

Kebijakan informasi publik di UIN Suka dianggap mengalami stagnasi dalam pelayanan. Apalagi, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pun masih simpang-siur.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK merupakan amanat UUD 1945 yang terus diupayakan sampai sekarang. Amanat tersebut diturunkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan lembaga badan publik untuk menyediakan informasi yang transparan, guna mewujudkan pengelolaan lembaga yang baik dan akuntabel. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) termasuk badan publik, tapi tidak mengimplementasikan UU tersebut.

Pada 15 Juli 2021, Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) melaporkan UIN Suka ke Komisi Informasi Pusat (KIP) atas sengketa informasi publik. Pasalnya, UIN Suka menolak memberikan tiga data informasi yang diminta oleh Sema, yaitu:

1. Salinan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UIN Sunan Kalijaga Tahun 2021.
2. Salinan Laporan Keuangan UIN Sunan Kalijaga Tahun 2020.
3. Salinan realisasi/laporan pertanggung-jawaban keuangan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2019 dan 2020 lengkap dengan data pendukungnya.

Abdul Azisurrohman, Ketua Senat Mahasiswa 2020-2021, mengatakan inisiatif untuk menyengketakan informasi publik itu tidak datang tiba-tiba. Ia terpantik oleh kenyataan paradoks tentang perputaran uang di kampus. Di satu sisi, Uang Kuliah Tunggal (UKT) semakin mahal, tapi di sisi lain, anggaran kegiatan mahasiswa semakin sedikit, juga tidak banyak perubahan signifikan fasilitas di kampus. Apalagi, saat itu sedang pandemi dan perkuliahan sepenuhnya dilakukan secara daring.

"Aku (Sema, Red.) dapat anggaran 10 juta itu tidak masalah, cuma (yang perlu aku tahu) 10 juta dapatnya dari mana? Dari BLU (Badan Layanan Umum) kah? Dari UKT kah?" katanya saat diwawancarai ***ARENA*** pada Jumat (15/03). "Sebagai bahan edukasi, kan, kita perlu tahu. Tapi semuanya kan enggak ada datanya di *website* UIN, jadi kita minta".

Mulanya, Sema meminta data tersebut lewat audiensi dengan rektorat. Namun, rektorat menolak memberikannya dengan alasan "mahasiswa tidak perlu tahu" dan laporan yang diminta Sema, cukup disetor ke Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal, menurut Azis, setiap instansi yang menggunakan uang negara harus diawasi. Dalam ranah kampus, mahasiswa berhak terlibat dalam pengawasan tersebut, sejalan dengan tujuan UU KIP untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat orang banyak.

Di satu sisi, Uang Kuliah Tunggal (UKT) semakin mahal, tapi di sisi lain, anggaran kegiatan mahasiswa semakin sedikit, juga tidak banyak perubahan signifikan fasilitas di kampus.

"Salah satu *impact* tidak ada pengawasan dan keterbukaan, mahasiswa UIN enggak ada yang tahu kenapa UKT dinaikkan, kenapa anggaran ini dikurangi, kenapa itu ditambahkan," ungkap Azis.

Sema memberikan surat permohonan informasi kepada UIN Suka pada 7 Juni 2021, lalu disusul surat keberatan pada 26 Juni 2021 lantaran surat pertama tak kunjung ditanggapi. Setelahnya, rektorat sempat memberi tanggapan pada 1 Juli 2021, tapi menurut Azis jawabannya tidak memenuhi tuntutan mahasiswa. Karenanya, Sema-U mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

Persidangan pun dilakukan beberapa kali, hingga akhirnya pada 15 November 2022, KIP memutuskan bahwa UIN Suka harus memberikan data dan informasi tersebut kepada Sema, "Sejak 7 hari kerja setelah dibacakan putusan, dalam bentuk *hardcopy*", sebagaimana tertulis dalam Putusan Mediasi bernomor NOMOR: 019/VII/KIP-PS-A-M-A/2021.

"Pada faktanya, komisi (informasi pusat) membenarkan kita, kan? Nah, ini satu poin bahwa pemangku rektor itu tertutup dan memang salah. Seandainya komisi memutuskan bahwa itu berkas rahasia, berarti kebijakan mereka (kampus) memang benar," tegas Azis.

Tujuh hari pasca keputusan pun berlalu. Data dan informasi yang Azis tunggu-tunggu tak kunjung ia terima hingga masa jabatannya berakhir. Ahmad Musthafa Roja', Ketua Sema UIN Suka 2021-2022 atau setelah Azis, mengonfirmasi bahwa sampai ia lengser pun, rektorat belum menyerahkan data dan informasi tersebut kepada Sema.

"Alasannya karena (sedang) enggak ada orangnya (yang bersangkutan), ditunda-tunda juga. Macam-macamlah alasannya," jawab Roja' kepada ***ARENA*** via telepon (30/03). Sejalan dengan Azis, Roja' menganggap kasus sengketa informasi ini menunjukkan bahwa tiga informasi yang dituntut Sema, sejatinya merupakan informasi publik yang harus dibuka.

ARENA kemudian menemui Prof. Al Makin, Rektor UIN Sunan Kalijaga. Menurutnya, pengelolaan informasi publik di UIN Suka sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk UU KIP. "Mana (informasi) yang sah ya dikeluarkan, mana yang enggak, ya, enggak boleh (dikeluarkan). Itu, kan, ada rahasia negara," tuturnya saat diwawancarai ***ARENA*** (26/03).

UU KIP memang mengatur klasifikasi informasi: ada "Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan" seperti tertulis pada Bab IV; dan "Informasi Yang Dikecualikan" pada Bab V. Dalam kasus ini, data dan

informasi yang diminta Sema termasuk dalam klasifikasi pertama. Semua informasi tersebut seharusnya dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1, PPID bertanggung jawab dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi, termasuk memilah jenis informasinya. Sayangnya, PPID di UIN Suka pada masa Al Makin tidak terlihat jejaknya.

Salah seorang pejabat di unit kampus mengatakan bahwa informasi publik di UIN Suka ditangani oleh Humas di bawah Biro AUK (Administrasi Umum dan Keuangan). Pada 20 Maret 2024, ***ARENA*** melayangkan surat permintaan wawancara pada Ali Sodiq, Kepala Biro AUK UIN Suka, setelah sehari sebelumnya mendatangi kantor AUK tapi tidak dapat bertemu langsung. Namun, hingga berita ini terbit, belum ada respon sama sekali.

Sejauh pelacakan ***ARENA***, Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan PPID di UIN Suka, terakhir pada kepemimpinan rektor sebelumnya, Yudian Wahyudi. SK tersebut bertanggal 29 Maret 2017, dengan Yudian sendiri sebagai penanggung jawab utama PPID. Al Makin pun enggan menjawab saat ditanyai ***ARENA*** tentang keberadaan PPID di UIN Suka.

“Saya waktunya tidak banyak kalau Anda tanya itu,” tanggapnya di tengah wawancara.

Nurainun Mangunsong, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka, mengatakan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang baik, badan publik perlu memiliki unit pengelola informasi tersendiri, yang dalam UU KIP disebut PPID. Hal itu penting karena badan publik harus memiliki sistem bersama dalam melayani informasi publik. “Inilah menjadi satu konsekuensi untuk mewujudkan tata kelola yang baik atau *good governance*,” tuturnya kepada ***ARENA*** (21/03).

Menurut Nurainun, ketiadaan PPID membuat kampus tidak memiliki standar dalam pelayanan informasi dan dokumentasi serta aturan yang jelas tentang bagaimana informasi publik akan disajikan. Kondisi ini memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan sengketa tentang informasi, seperti yang

terjadi pada kasus Sema tadi.

Mencari *Website* Informasi Publik yang Informatif di UIN Sunan Kalijaga

Tidak terangnya keberadaan PPID di UIN Suka ternyata segendang sepenarian dengan tidak aktifnya situs web resminya. Dalam situs *ppid.uin-suka.ac.id* ini, tidak ada informasi mutakhir selama masa Al Makin menjabat rektor. Unggahan terbaru berupa berita di tahun 2019 ketika UIN Suka masih dipimpin Yudian, dan itulah satu-satunya berita yang dipublikasi di sana.

Padahal, seperti kata Nurainun, salah satu indikator keterbukaan itu diukur melalui situs web, tempat informasi dapat dengan mudah diakses masyarakat. Dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, dijelaskan di pasal 4 bahwa badan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk situs resmi. Nyatanya, situs resmi informasi publik UIN Suka malah sama sekali tidak berfungsi.

Di situs web resmi UIN Suka *uin-suka.ac.id* terdapat menu "Informasi Publik" pada kategori "Data & Fakta". Namun ironis, profil PPID yang tersedia di halaman ini berisi SK Pengangkatan PPID masa Yudian, bukan Al Makin. Selain itu, halaman "Informasi Publik" ini pun hanya sedikit memberikan informasi publik. Dalam dua tahun ke belakang, 2024 dan 2023, hanya ada dokumen yang tercantum: Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Sementara, laporan keuangan tahunan yang diunggah terakhir tahun 2022. Tak ada satupun informasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagaimana dituntut oleh Sema.

Nurainun menyayangkan kondisi situs informasi publik di tingkat universitas, belum lagi situs-situs di fakultas, program studi, dan unit lainnya. Dalam hal ini, ia melihat pentingnya keberadaan PPID agar tercipta standar bersama dalam mengelola informasi publik.

"Coba cek di webnya UIN, di webnya fakultas, ada enggak di situ satu untuk memberikan informasi kepada insan akademik, untuk tahu berapa sebenarnya anggaran setiap fakultas setiap semester, dan anggaran itu didistribusikan ke mana saja, berapa, dan untuk apa?" tuturnya.

Nurainun menilai kebijakan informasi publik di UIN Suka mengalami stagnasi dalam pelayanan. Alih-alih transparansi, kampus justru menutup-nutupi informasi yang menjadi hak publik, terutama soal tata kelola anggaran. Sebagai dosen hukum administrasi, ia mengaku gelisah dengan tata kelola informasi di UIN Suka. Menurut Nurainun, anggaran pendidikan yang setiap tahun naik harus tepat sasaran. Oleh karena itu, agar pengelolaan tepat sasaran diperlukan keterbukaan informasi agar publik bisa berpartisipasi.

"Yang penting menurut saya tadi, keterbukaan itu dalam rangka tata kelola yang baik, bersih, efisien, dan efektif, sehingga tata kelolanya tepat sasaran," tuturnya. []

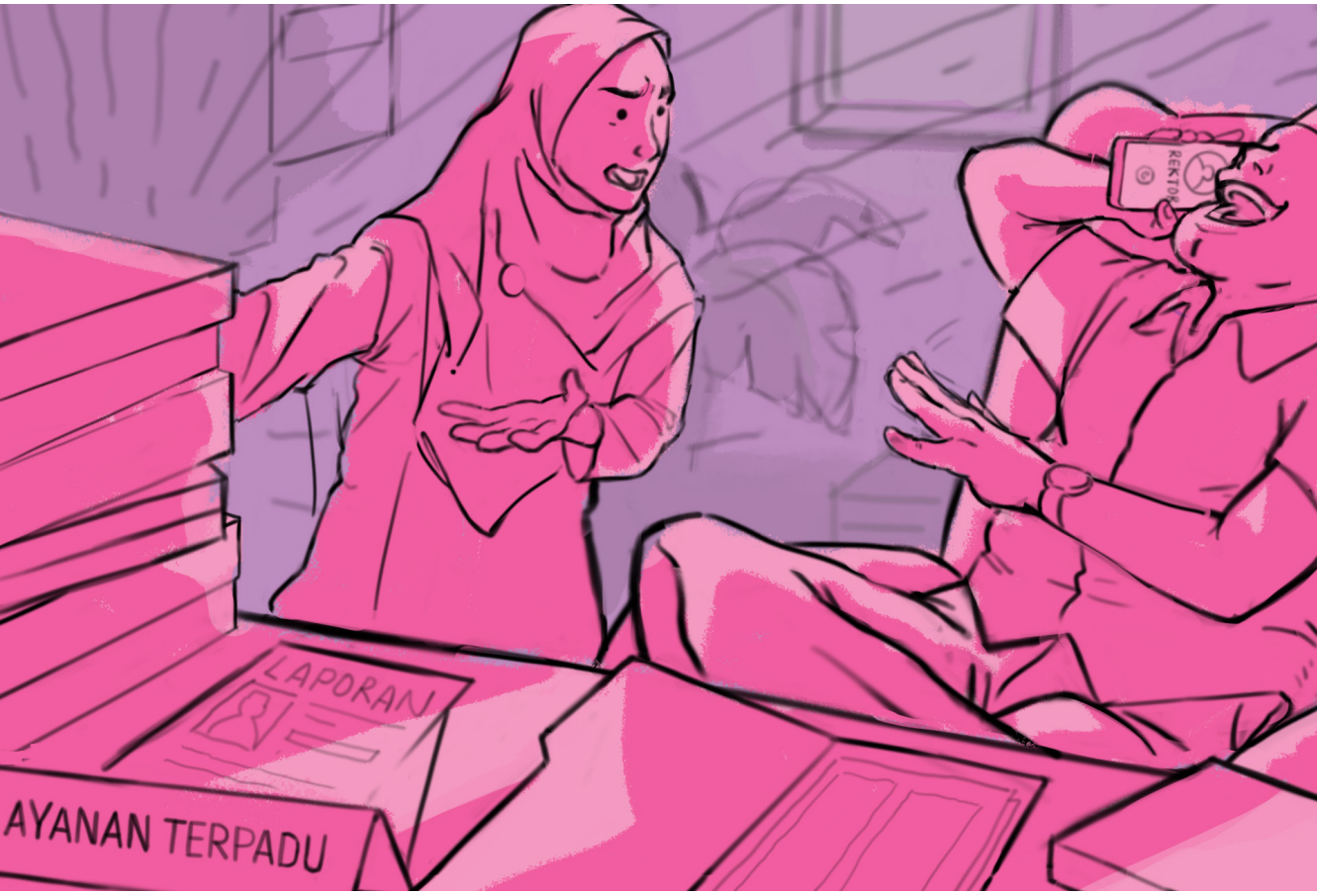

MENEROPONG PANGGUNG BELAKANG PLT

oleh **Maria Al Zahra**

Pusat Layanan Terpadu (PLT) belum maksimal dalam menangani kekerasan seksual. Ada banyak masalah yang menghambatnya, termasuk dari kampusnya sendiri. PLT perlu menjadi unit mandiri dan diberi kewenangan penuh.

PUSAT LAYANAN TERPADU (PLT) dibentuk pada Oktober 2020 melalui SK Rektor Nomor 187.2. PLT memiliki tugas mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus yang melibatkan seluruh civitas akademik.

Dibentuknya PLT menyusul terjadinya kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Kiran (bukan nama sebenarnya), pada Februari 2020. Saat itu, untuk mengkonsolidasikan kasus, terbentuklah aliansi Gayatri yang terdiri dari tiga organisasi: Srikandi UIN Suka, Rumah Gender FUPI, dan Sema-Dema Universitas. Kasus Kiran dibawa sampai ke Wakil Rektor 3 yang saat itu dijabat Waryono Abdul Ghofur, tapi sayangnya tidak menemukan titik terang penyelesaian.

Dengan dibentuknya PLT, penanganan kekerasan seksual harusnya menjadi lebih jelas. Apalagi dengan terbitnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan

dan Penanganan Kekerasan Seksual pada 27 Januari 2023. Ini merupakan bentuk kemajuan kampus berkomitmen menyelesaikan masalah kekerasan seksual. Namun di satu sisi masih menyisakan banyak pertanyaan terkait bagaimana realita penanganannya.

Pasca SOP ditetapkan, PLT melakukan sosialisasi SOP ke fakultas-fakultas. Namun, sosialisasi terlihat tidak dijalankan dengan maksimal. Dari akun Instagram PLT, poster sosialisasi di Fishum dan FDK diunggah pada 14 Juni 2023. Namun, di tanggal 14 itu pula hari pelaksanaannya. Sampai pada 30 Agustus 2023, PLT lewat unggahannya mengklaim sosialisasi telah dilaksanakan di tujuh fakultas. Padahal, di antara bulan itu mahasiswa tengah berlibur. Tak heran jika tertulis bahwa sebagian besar yang mengikuti kegiatan adalah dosen dan tendik. Jika dilihat dari foto, jumlah peserta paling banyak hanya 28 orang saat di Fishum.

Miftahul Rizki, mahasiswi yang menjadi moderator pada sosialisasi di FDK, menuturkan dirinya baru dihubungi sehari sebelum pelaksanaan. Saat itu sosialisasi dilaksanakan di ruang rapat dekanat lantai 2 yang hanya muat 20 orang saja, selain juga dilakukan secara daring. Tempat itu menurutnya tidak strategis.

“Sosialisasinya itu informasinya gak menyeluruh, gak semua mahasiswa tau,” tutur Miftah saat diwawancarai ***ARENA*** (12/10/2023). “Kadang kita nyebar pamflet H-seminggu teman-teman mahasiswa belum tentu datang, apalagi yang H-1. Kalau gini apa jaminannya sosialisasi itu mencapai target?” tegas Miftah yang juga ketua koordinasi mahasiswa di Rumah Gender FDK.

Miftah berpendapat bahwa sosialisasi hanya sebatas formalitas. Kegiatan tidak dirancang matang-matang, padahal sosialisasi SOP sangat penting untuk seluruh civitas kampus. Karenanya, Miftah mengulang kembali sosialisasi saat kegiatan *Gender and Islamic Class* (GIC) yang diinisiasi Rumah Gender FDK.

“Karena kita ngerasain (sosialisasi) itu belum maksimal dan teman-teman maba juga pada belum *dapet* hal-hal itu,” tuturnya.

Terbatasnya Wewenang PLT

Saat diwawancarai ***ARENA***, Andayani Ketua PLT mengatakan ada 25 kasus yang ditangani PLT. Kasus ini didominasi kekerasan verbal kategori ringan. Namun, ada juga kategori sedang seperti Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), dan dua kasus yang korbannya ingin menempuh jalur hukum. Dari kasus-kasus tersebut, ada beberapa pelaku yang dikenakan sanksi berupa surat teguran, penahanan ijazah dan skorsing. Sedangkan beberapa lainnya tidak ditindaklanjuti karena korban tidak menghendakinya.

“PLT kan di satuan pendidikan, jadi sanksinya itu secara akademik. Kami fokus ke sanksi administratif, akademik dan pembinaan,” ujarnya (15/12/2023).

Artinya, PLT tidak berwenang memberi putusan atas tindakan pelaku atau terlapor. Sebagaimana disebut dalam Peraturan Rektor UIN Sunan Kalijaga nomor 21.1 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga, pihak yang berwenang menindaklanjuti kasus adalah pimpinan, yang dalam hal ini rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan dan direktur pascasarjana. Sementara kewenangan PLT terbatas melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan memberikan rekomendasi sanksi.

Saat diwawancarai ***ARENA*** (26/03), Rektor Al Makin mengatakan bahwa penindakan tegas kepada pelaku cukup riskan di kampus. Menurutnya, yang penting korban harus dilindungi dan pelakunya tidak perlu dipermalukan dan diumum-umumkan.

“Kita harus hati-hati, karena itu sudah wilayah hukum. Dalam wilayah hukum, kalau kita salah melangkah, kita dituntut balik,” tuturnya.

Lindra Darnela, anggota PLT bagian advokasi dan penanganan, mengakui bahwa kewenangan PLT belum otonom karena bersifat rekomendasi. Keterbatasan wewenang ini bisa menghambat penyelesaian kasus. “Ada anak yang dipanggil PLT itu mengakui (perbuatannya), tapi pas dipanggil dekan nggak ngaku. Jadi ini melambatkan kasus,

kami harus selidiki-manggil lagi dan lainnya," tutur Lindra (20/03).

Karena itu, menurutnya PLT perlu menjadi unit mandiri dan diberi kewenangan penuh agar dapat menyelesaikan kasus sampai tuntas.

Keterbatasan wewenang ini cukup disayangkan oleh pelapor, salah satunya Rani (bukan nama sebenarnya). Dalam kasus yang ia laporkan, PLT bahkan tidak bisa merekomendasikan apapun karena pelaku tidak mengakui apa yang dilaporkan.

"Tapi dari kesaksiannya itu bahkan PLT *ngakuin* kalau kesaksian pelaku itu banyak inkonsisten, gak jelas, banyak diragukan. Cuman karena memang gak ada bukti fisik, interpretasi PLT gak bisa *dibuktiin*," tuturnya kepada ***ARENA*** (22/03).

Dari kasus lain yang Rani ketahui, PLT pun hanya merekomendasikan kepada dekanat. "Dari dekan katanya 'mana sini pelakunya biar aku *omongin*'. Masa cuman *diomongin* aja tindakan kayak gini," ujarnya.

Dengan hasil seperti itu, Rani bahkan merasa rugi telah melapor ke PLT. Karena hal itu membuat pelaku merasa besar kepala karena tidak jera dan tidak ada yang ditakutkannya lagi. "Aku kepingin orang-orang lain juga tau kalau orang ini pelakunya dan kalian harus waspada."

Dalam proses penanganannya, Rani juga mengaku tidak puas. Ia sendiri empat kali mendatangi PLT untuk penanganan kasus, sementara pelaku hanya sekali dipanggil ke PLT.

"Korban berani lapor *aja* udah berat, apalagi ini dibahas terus berbulan-bulan. Dia harus mengingat lagi rasa traumatisnya. Aku sebagai keluarganya aja ngerasa ini melelahkan," terangnya.

Andayani tak menampik bahwa penanganan kasus di PLT sangat runyam. Terkadang ada pelaku yang mengancam, entah kepada PLT atau pejabat berwenang, hingga membuat keputusan penanganan berubah. Tidak semua pelaku mau mengakui perbuatannya pada korban.

"Ada dosen itu yang marah banget dan mengadu ke polisi bawa pengacara. Di media sosial juga kami diserang," bisik Andayani. "Dinamikanya berat, perlu kerjasama dari berbagai pihak," lanjutnya.

Melihat Bantuan dari Kampus

Anggota PLT adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan kesadaran pada isu kekerasan seksual. Sebelum menjadi anggota PLT mereka sudah tergabung di organisasi atau kegiatan gender, seperti Rumah Gender, Pusat Studi Wanita, Pusat Layanan Difabel dan lainnya. Namun, banyak hal merintangi jalan PLT di UIN Suka, salah satunya beban ganda menjadi dosen sekaligus anggota PLT.

Sebagai dosen, Lindra memiliki kewajiban mengajar, mengabdi, dan meneliti. Kewajiban dosen ini tidak bisa dilepas begitu saja. Alhasil terkadang membicarakan PLT harus di luar jam kerja.

Lindra berpandangan seharusnya orang yang ada di PLT adalah orang-orang profesional, secara teori maupun praktek. Menurutnya, selama ini orang-orang PLT adalah dosen yang mumpuni hanya dalam teori.

"Kalau kami ini ya nggak profesional. Tapi kami juga nggak bisa sat-set dan fokus *ngurusin* PLT," ujar Lindra yang juga menjadi dosen Fakultas Syariah dan Hukum.

Sebagai dosen Lindra memiliki kewajiban mengajar, mengabdi dan meneliti. Kewajiban dosen ini tidak bisa dilepas begitu saja. Alhasil terkadang membicarakan PLT harus di luar jam kerja. "Nanti kalau *ngurusin* (kasus) ini, diprotes anak bimbingan, diprotes mahasiswa, karena kami harus mengajar juga. Jadi ada sedikit *delay* untuk menangani kasus yang nggak bisa dimungkiri," ujarnya.

Terkait persoalan ini, Al Makin berdalih

bahwa dosen di UIN Suka cukup profesional dan dapat diandalkan mengurus PLT. “Dosen kita itu banyak psikolog, harus dicatat dosen kita itu lulusan Kanada, lulusan Australia. Lebih hebat dari tempat lain, kalian harus bangga dengan kampus,” katanya.

Selain itu, infrastruktur dari kampus juga dirasakan belum maksimal. Dalam SOP, salah satu standar layanan bagi korban adalah tersedianya sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk penanganan korban. Dalam Dirjen Pendis Kemenag dijelaskan bahwa yang dimaksud sarana prasarana itu seperti kantor, ruang pengaduan dan transportasi dalam pelayanan korban.

PLT sendiri baru mendapatkan kantor pada Oktober 2023, tiga tahun sejak SK PLT diterbitkan. Lindra menerangkan, selama tidak ada kantor khusus, PLT meminjam kantor lain yang ada di kampus, seperti ruang Pusat Studi Wanita atau ruang Dharma Wanita.

Kantor PLT berada di gedung rektorat lama lantai dua. Kantornya berada di pojok, menyelip, dan hanya ada selembar kertas HVS di depan pintu dan *banner* kecil di depannya. Kantor PLT masih sangat kosong. Saat ***ARENA*** menyambangi pada 6 Desember 2023, kantor juga tidak ramai orang berjaga, hanya ada *volunteer* yang berasal dari mahasiswa. Mereka bergantian setiap harinya. Sedangkan untuk pengurus PLT tidak selalu menetap di kantor. Di kantor inilah proses penanganan kasus biasanya dilakukan.

Keberadaan kantor menjadi hal penting dalam penanganan kekerasan seksual. Menurut SOP, kriteria kantor yaitu adanya ruang tunggu disertai dengan meja, sofa, komputer, printer dan buku pendaftaran; ruang konseling yang tertutup dan kedap suara; ruang kerja; toilet; dan CCTV. Sayangnya kantor PLT belum memenuhi syarat-syarat di atas. Salah satunya ruang konseling.

Rani menceritakan bahwa konselingnya pada pemanggilan keempat dilakukan di ruang tengah yang terbuka. Ia bahkan menyangsikan unsur kerahasiaan.

“(Orang) yang di sofa depan kemungkinan dengar percakapan kita yang di dalam karena memang nggak ada sekatnya. Ibu konselornya juga keliatan udah nggak nyaman terus cari meja atau kursi biar lebih dekat, tapi gak nemu,” ungkapnya.

Selain itu, pendanaan PLT juga terbilang susah. Untuk menutup pendanaan yang tidak turun, Andayani dan anggota PLT lainnya bersepakat menyisihkan uang pribadi.

“Bahkan buat beli gula dan teh. Alat tulis juga beli sendiri,” ujar Andayani. “Pendanaan *aja* kami belum dapat rutin (dari kampus), beberapa kali ini kami sudah *nanganin* dan belum dapat. Kemarin cuman dikasih buat *workshop* dan itu di akhir tahun *aja*,” lanjutnya.

Saat ditanyakan pada Al Makin terkait bantuan dari kampus, ia menjawab singkat bahwa dukungan itu dengan disediakannya pengurus dari dosen dan *volunteer* dari mahasiswa. Sayangnya ***ARENA*** tidak bisa melanjutkan pertanyaan terkait PLT. “Ada banyak hal yang harus diperhatikan. PLT itu enggak usah dibesar-besarkan, itu sudah kita lakukan,” tuturnya.

Rani berharap PLT dapat memperbaiki kinerja dalam penanganan kasus. Kedua, PLT dapat memberikan pemahaman pada civitas akademika kampus soal kekerasan atau pelecehan seksual.

“Ketika ada kasus masuk itu apa aksimu? Tindakan yang bukan hanya secara preventif, tapi tindakan nyata. Harusnya PLT bisa *ngelakuin* lebih (dari sekadar pencegahan), karena udah dari 2020, masa iya nggak progres,” ujarnya.

Rani mengaku belum merasakan esensi PLT sebagai lembaga penanganan kekerasan seksual. Pengorbanan korban untuk berani lapor tidak berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan. Efek jera buat pelaku pun masih diragukan. “Tapi aku juga nyadar kalau penanganan kasus KS di kampus itu masih sangat payah dan masalah struktural banget,” tuturnya. []

RAPOR MERAH DEMOKRASI DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

oleh **Fauzul Abid***

PADA SUATU HARI, di ruang kelas yang sempit dan sesak, seorang dosen memperkenalkan adagium *cogitationis poenam nemo patitur* yang berarti: "Seseorang tidak dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan". Adagium ini menjadi pelindung kebebasan berpikir dan berpendapat semua orang dari jerat hukum yang sewenang-wenang. Negara pun mengimplementasikannya dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, yang berlaku bagi semua ranah di masyarakat, pun di UIN Sunan Kalijaga.

Kampus tersebut tempat saya mengenal seruan macam "mahasiswa harus kritis", "*agent of change*", "mahasiswa sebagai *guardian of value*", atau apalah itu. Saat masih mahasiswa baru, saya optimis mahasiswa dapat menjalankan peran-peran tersebut dan kampus menjamin kebebasannya. Namun, fakta yang terjadi mengecewakan.

Pada 2021, seorang mahasiswa pascasarjana, Ainun Masnunah, mendapat panggilan dari dekan akibat cuitannya di Facebook tentang keresahan perkuliahan daring. Pihak kampus menganggap cuitan

Ainun sebagai tindakan menjatuhkan nama baik kampus. Ainun resah karena beberapa dosen berlaku sewenang-wenang, seperti mengubah jadwal sepihak, bahkan ada dosen yang hanya masuk dua kali selama satu semester. Selain itu, Ainun merasa kecewa karena merasa telah memenuhi kewajibannya membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi tak mendapatkan pendidikan dan pengajaran secara utuh.

Padahal, mengungkapkan keresahan termasuk hak kebebasan berpendapat yang seharusnya ditanggapi kampus dengan perbaikan kinerja dosen, bukan pemanggilan. Apalagi sudah jelas, keresahan tersebut buah dari sistem pembelajaran di universitas yang malapraktik. Dalam Pasal 5 Keputusan Rektor UIN Suka Nomor 139 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Suka, mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan dari dosen universitas. Dari sini, saya melihat pihak kampus telah gagal dalam dua hal: memenuhi hak mahasiswa dan menjaga praktik demokrasi di lingkup kecil.

Mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan dari dosen universitas. Dari sini, saya melihat pihak kampus telah gagal dalam dua hal: memenuhi hak mahasiswa dan menjaga praktik demokrasi di lingkup kecil.

Lalu pada 2022, ada Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang dibubarkan. Lazimnya, PBAK diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut, tetapi PBAK 2022 hanya sehari. Mengapa demikian? Sekonyong-konyong, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. membubarkan kegiatan itu tanpa alasan yang zahir. Al Makin hanya mengatakan keputusan membubarkan PBAK ini merupakan hasil istikharah. Jelas sangat aneh ketika seorang rektor, pemimpin civitas academica, memberikan argumen tidak rasional dan ilmiah.

Saat itu, pada hari pertama PBAK, spanduk protes tentang mahalnya UKT dibentangkan saat Wakil Rektor III Abdur Rozaki mengisi *talkshow*. Kejadian tersebut dianggap akan menimbulkan aksi lanjutan pada hari berikutnya. Isu itu tersebar dan disinyalir menjadi alasan pembubaran PBAK. Pasalnya, setelah pembubaran PBAK, beberapa mahasiswa yang dianggap provokator dalam demo PBAK mendapat panggilan dari pihak kampus.

Pembubaran PBAK itu, selain tidak rasional, juga dilakukan sepihak. Panitia PBAK yang telah menyiapkan berbagai hal kebanyakan tidak tahu PBAK akan dibubarkan. Peristiwa ini bertentangan dengan esensi demokrasi.

Dalam pandangan Hans Kelsen, salah satu esensi demokrasi adalah adanya kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan tatanan dan penyelesaian konflik. Melihat fenomena PBAK 2022, tidak terlihat adanya penyelenggaraan demokrasi karena tidak adanya proses komunikasi atau kompromi yang jelas antara pihak kampus dengan mahasiswa sebelum pembubaran PBAK. Padahal dalam Pasal 6 UU Perguruan Tinggi, perguruan tinggi harus diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Hans Kelsen juga menyebut prinsip demokrasi adalah adanya kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan jaminan dalam berpendapat. Dalam tulisan Al Makin di *Kompas.com* yang berjudul "Adakah Demokrasi di Islam?", ia berpendapat bahwa terdapat prinsip demokrasi dalam nilai-nilai keislaman, yakni musyawarah, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan lain-lain.

Dalam Statuta, disebutkan UIN Suka berasaskan Pancasila dan berdasarkan

Islam, yang mana nilai-nilai keislaman dalam prinsip demokrasi termasuk di dalamnya. Artinya pengelolaan kampus harus menjunjung tinggi demokrasi. Selain itu, Pasal 11 ayat (5) Statuta UIN Sunan Kalijaga juga mengatur, Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Idiom, UUD, hingga peraturan di universitas telah menjunjung tinggi demokrasi dan menjamin kebebasan akademik bagi segenap civitas academica. Namun, alih-alih mempraktikkannya, Al Makin malah membatasi dan memberangus kebebasan akademik mahasiswa.

Padahal, Al Makin tak hanya rektor, ia juga seorang dosen, akademisi sosiologi agama. Topik-topik yang dibahasnya tentang keislaman, politik, dan demokrasi. Saya membaca 4 opininya yang mengulas demokrasi, asal-mulanya, hingga hubungan demokrasi dengan Islam. Tulisan-tulisannya menggambarkan Al Makin sebagai sosok yang paham akan demokrasi. Tapi tampaknya paham teori belum tentu senada dengan praktik.

Fenomena yang terbaru adalah pembubaran Festival Keadilan yang diselenggarakan Social Movement Institute (SMI) bersama Dema UIN Suka pada 10 Desember 2023. Mulanya festival tersebut bertempat di Gor Tenis UIN Suka, tetapi karena mendapat larangan dari Al Makin, terpaksa dipindahkan ke Bento Kopi Godean. Al Makin beralasan, diskusi tersebut memiliki kepentingan politik, meskipun tidak jelas kepentingan politik apa yang ia maksud. Lagi-lagi, Al Makin memberikan alasan yang sumir dan tidak jelas.

Dari tulisan ini, kita dapat melihat setiap tahunnya UIN Suka berulah dengan demokrasi. Catatan ini sebagai rangkuman evaluasi dan hadiah bagi kinerja Al Makin di akhir masa jabatannya sebagai rektor. Semoga catatan ini sebagai *Vox Populi Vox Dei* yaitu suara rakyat adalah suara tuhan, yang harapannya bisa didengar oleh Al Makin sebagai rektor UIN Suka, dan rektor periode selanjutnya. Semoga demokrasi di UIN Suka dapat berjalan sebagaimana fitrahnya. []

**Seseorang yang menunggu pendidikan gratis.*

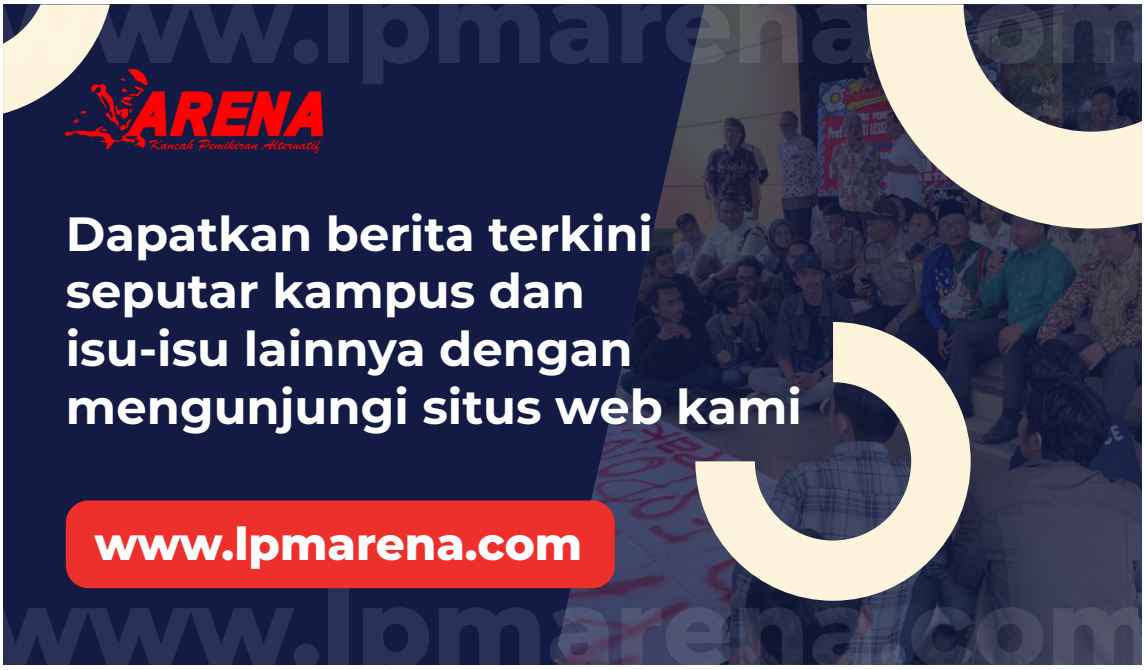

4 TAHUN MENJADI REKTOR

MEMORABILIA, PENGALAMAN, DAN PERJUANGAN

2024 MENJADI TAHUN TERAKHIR bagi Rektor Al Makin memimpin UIN Sunan Kalijaga untuk periode pertamanya sejak menjabat pada tahun 2020. Di bawah kepemimpinannya ini, di UIN Suka banyak terjadi hal yang memantik publik. Dari masifnya pameran-pameran kesenian di kampus hingga masuknya pinjaman online dalam skema pembayaran UKT mahasiswa.

Al Makin sendiri mengaku banyak bersyukur karena menjadi rektor adalah pengalaman pertamanya. Ia memiliki latar belakang peneliti dan banyak menulis buku. Dua hal ini yang banyak ia terapkan dalam menjalankan kampus. “Saya kembali ke buku-

buku saya, saya baca dan saya lakukan," kata akademisi asal Bojonegoro tersebut.

Al Makin menerima wartawan ***ARENA***, Maria Al-Zahra, Ahmad Zamzama, dan Syifa Nurhidayah, di kantor rektorat gedung Pusat Administrasi Umum lantai 2, pada 26 Maret 2024. Kami berbincang soal kepemimpinannya di kampus, kesenian, hingga beberapa kebijakannya. Sayangnya tidak semua pertanyaan, terutama soal kebijakan, dapat ia jawab secara lugas. "Carilah (pembahasan) yang lain, yang bernilai positif, yang orang terinspirasi dan orang merasa bangga dengan kampus," tuturnya saat ***ARENA*** bertanya lebih jauh tentang Pusat Layanan Terpadu yang dibentuk melalui Surat Keputusan yang ditandatanganinya pada 2020. Berikut petikan wawancaranya.

Menjelang akhir jabatan, bagaimana perasaannya di akhir masa jabatan?

Bersyukur, saya mendapat kesempatan 4 tahun. Jadi ada seorang pelukis terkenal, alirannya kubisme, Pablo Picasso, (pernah berkata) dalam bahasa inggrisnya begini, "*the mission in life is to find gift and to give it, away to the world*". Misi kita dalam hidup itu mencari bakat, mencari anugerah dalam diri kita. Setelah dapat, berikan kepada dunia.

Bapak menilai 4 tahun belakang ini bagaimana?

Saya sangat bersyukur, saya banyak belajar. Dan itu tantangan yang baru, yang saya sama sekali tidak sangka. Saya ini kan peneliti, *researcher*, tidak hanya di Indonesia. Peneliti-dosen di Jerman, Singapura, Australia, Kanada, Amerika. Saya itu penulis buku, penulis jurnal selama ini, dan saya juga seniman. Itu lukisan saya. Makanya saya kutip Pablo Picasso.

Selama 4 tahun itu pembelajaran atau pengalaman apa yang paling berkesan?

Leadership, dan cukup besar tanggung jawabnya. Ini tidak mudah. Sekali lagi, saya kan peneliti lapangan. (Untuk menerbitkan) buku saya tentang nabi-nabi Nusantara itu saya *interview* seluruh Indonesia; mencari orang yang mengaku menjadi nabi. Saya datangi, saya *interview*, jadi buku. Dan saya mendalami isu keragaman, pluralisme, kebhinekaan, itu juga jadi buku. Semuanya jadi buku, nggak ada yang nggak jadi buku. Saya melihat antara Barat dan Timur, Eropa, Asia, Amerika, Indonesia di dalamnya, saya tulis juga jadi buku. Saya hanya membayangkan saya menjadi penulis, *scholar*, cendekiawan, dan itu saya lakukan.

Kalau tantangan meneliti, menulis, sudah saya lalui sejak kecil. Saya kan pendidikannya pesantren, dan ayah saya seorang kiai di Bojonegoro, dan saya jadi dosen. Tiba-tiba saya menjadi rektor. Ini hal baru, bagaimana caranya memimpin orang banyak. Dan ternyata semua yang saya tulis tadi saya lakukan. Inilah pembelajaran, dan saya membentuk diri saya menjadi pemimpin.

Bagi Bapak menjadi rektor adalah hal baru, bagaimana tantangannya?

Dalam filsafat kuno, ada seorang filsuf namanya Socrates, kemudian diteruskan filsafat stoik. Itu filsafat di era Romawi Kuno. Tantangannya adalah membentuk diri sendiri, dan membentuk diri sendiri itu seperti memahat patung pake pisau, tetapi bahannya badan sendiri. Jadi kita bayangkan! Karena saya pelukis, ya. Membuat patung, tapi bahannya badan sendiri, kalau nggak pas ya disesuaikan dengan pisau. Itu filsafat kuno.

Selama menjadi rektor, prinsipnya bagaimana selama memimpin?

Saya kembali ke buku-buku saya, saya baca dan saya lakukan. Selama ini kan saya menulis, misalnya kebhinekaan. Bahwa orang itu berbeda-beda, dan kita harus menghargai perbedaan. Tapi itu kan teori. Ketika saya memimpin, saya menjumpai orang yang berbeda-beda dan itu di bawah kepemimpinan saya. Saya harus meletakkan orang sesuai dengan letaknya tanpa harus bertengkar, tanpa harus memaksa orang untuk sama dengan saya. Tapi saya memahami dan mengakomodasi mereka. Ini kepemimpinan yang sangat penting, dan semua pemimpin harus bisa melakukan itu. Ini saya melakukan

apa yang sudah saya tulis dengan cara lain.

Kalau diimplementasikan ke program, seperti apa bentuknya?

Kemudian (soal) keragaman itu, kan saya juga aktivis lintas iman. Saya kan akrab dengan komunitas katolik, hindu, buddha. Ketika saya memimpin, saya wujudkan itu. Saya jalin kerja sama dengan katolik, saya pergi ke Vatikan, saya beri gelar honoris causa kepada Paus, kemudian kepada PBNU: Kiai Yahya Cholil Staquf, kepada Muhammadiyah: Dr. Sudibyo Markus. Jadi yang saya tulis tentang keragaman itu saya lakukan selama saya memimpin. Ini pengalaman yang luar biasa bagi saya.

Bapak sering melukis, kenapa harus membawa dunia seni, termasuk di wilayah kampus?

Seluruh perubahan di dunia ini—perubahan agama, peruba-han ilmu pengeta-huan—itu dari seni. Bahkan menurut filosof, Muhammad Iqbal, seni itu tak terbatas, seni itu pancaran Tuhan. Kita menikmati semua yang ada di dunia, ini seni semua. Baju Anda itu juga seni. Kalau gak indah, *ngapain dipake*?

Apa alasan sering mengadakan pameran di kampus?

Itu sarana komunikasi yang paling efektif. Kalau Anda lagi patah hati kan *dengerin* lagu, Anda nulis puisi. Seni itu komunikasi yang nyaman. Seni itu di dalam.

Di era abad 17 di Eropa, ketika manusia terkungkung oleh dogma gereja, mereka kembali ke seni; meneliti seni Yunani, seni Romawi. Sama dengan di Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, seni bergerak. Misalnya ketika Diponegoro ditangkap, ada pelukis Belanda namanya Nicolaas Pieneman melukis Diponegoro dan De Kock; dan (Pieneman) memposisikan Diponegoro di bawah tangga, De Kock di atas dan Diponegoro merunduk. Inilah seni. Dia menangkap makna penjajahan dari kacamata penjajah. Kemudian pelukis selanjutnya, Raden Saleh, melukis kembali, Diponegoro sejajar dengan De Kock dan Diponegoro menatap mata De Kock. Seni ini sangat mengubah dunia. Jadi Anda sekarang menikmati Telfon ini. Itu juga seni.

(Di) Masa pencerahan itu, dunia ini terevolusi oleh seni dan lahirlah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu mengikuti seni. Lahirlah teknologi. Sama dengan dunia sekarang, disebut postmodernisme, dimulai dari Pablo Picasso, (aliran) kubisme. Dunia saat ini juga sama, (adanya) kamera, pulpen, semuanya lewat seni. Makanya sangat penting seni ini dipegang.

Apakah kesukaan pada seni mempengaruhi style Bapak dalam berpakaian?

Yang jelas, seni itu membuat kita bahagia, seni itu membuat kita lapang, kita lebih Ikhlas.

Warna apa yang jadi kesukaan dalam berkesenian?

Itu kan lukisan saya, bisa dilihat. Jadi, (kesukaan warna) itu masing-masing. Kalau kita sudah melukis kita mempunyai *feeling* harus ditaruh di mana,

semua warna baik, tinggal bagaimana kita menciptakan komposisi.

Setelah masa jabatan rektor selesai, Bapak hendak melanjutkan ke mana?

Ya itu takdir Tuhan. Kalau saya itu kan sudah seperti (perkataan) Pablo Picasso itu: mencari sesuatu, mencari anugerah Tuhan, anugerah itu akan saya berikan. Tugas saya adalah mencari anugerah tadi.

Dicari di mana anugerah itu?

Saya kan tidak menyangka saya mendapatkan amanah ini. Saya bekerja keras setelah mendapat amanah. Tadi saya sebutkan, (seperti) honoris causa, (akreditasi) level internasional yang mengangkat kampus kita, itu kan anugerah dari Tuhan dan saya bisa melakukan. Kemudian akreditasi tadi, unggul semua itu, juga anugerah Tuhan dan sudah kita berikan. Jadi selama kita mendapatkan amanah, berikan yang terbaik, lindungi yang lemah, tutupi semua kelemahan semua orang, pahami keragaman, pahami perbedaan. (Maka) Anda di jalan yang benar. Tapi ketika Anda mendapatkan amanah, tidak dilaksanakan dengan baik, Anda menyalahkan orang lain, Anda komplain, kritik sana-sini.

Jadi ada filosof kuno namanya Marcus Aurelius mengatakan "*never complain*", jangan pernah mengeluh, "*not even by yourself*".

Siapa sosok yang berperan besar di balik perjalanan karir Bapak?

Istri saya. Istri dimana-mana ya begitu. Pemimpin di dunia ini rata-rata tergantung keluarga. Kalau keluarganya aman, ya aman.

Ya di sampingnya kan, saya melukis semua (sosok yang berperan bagi saya) ini. Anda saksikan. Anda tahu siapa ini? Bunda Teresa. Nah, ini yang mensupport saya. Itu, Dalai Lama. Jadi Anda tau ya, visi (kenapa saya melukis) ini. Itu ada lukisan Gandhi. Sebelah sini lukisan Punokawan. Tau Punokawan?

Kalau dalam Jawa ada namanya Astabrata, ajaran tentang kepemimpinan yang diberikan oleh Sri Rama, tokoh Ramayana, kepada Wibhisana. Hampir semua sultan, bahkan semua presiden di Indonesia, itu membaca Astabrata. Jadi, memimpin itu ya harus spiritual, jangan kamu nilai materinya, harus kamu lihat sisi dalami. Astabrata itu dipegang oleh semua pemimpin di Indonesia. Itu pake ijazah kalau dalam pesantren. Dan memimpin itu bukan memimpin materi loh ya, memimpin itu memimpin spiritual, menyentuh jiwa.

Bagaimana mengimplementasikan itu dalam program-program kampus, mengingat spiritualitas cenderung tidak terlihat?

Iya (tidak bisa dilihat), tapi bisa dirasakan. Kenapa kita bisa sukses? Karena caranya spiritual juga: jalan berdoa, memahami orang perorang secara spirit. Kenapa kita unggul semua? Itu tidak hanya usaha lahiriyah, itu juga usaha batiniyah; usaha zikir.

Di ujung periode rektor pertama, apa pesan untuk mahasiswa?

Bersyukur, berpikir positif. Bersyukur atas kesempatan. Kalau bersyukur, *la'in syakartum la'azidannakum*, Anda akan ditambah nikmatnya. Saya bersyukur dapat kesempatan ini, saya bekerja keras untuk rektor ini, dan ini saya berikan kepada mahasiswa. (Akreditasi) unggul itu untuk mahasiswa, masa depannya biar cerah. Kita level internasional, biar bahasa inggris kalian meningkat. Kalau sering ada bule di sini, kalian terpaksa belajar bahasa Inggris. Dan ini nanti setiap fakultas akan buka IUP (International Undergraduate Program), kelas internasional. Itu tujuannya tidak hanya untuk orang yang minat saja, itu akan menyebar (ke semua orang), standar akan naik terus.

Karena keterbatasan halaman, beberapa bagian dari tulisan ini tidak dimasukkan. Versi lengkapnya bisa dibaca di website* ***Ipmarena.com**.*

Carut-Marut UKT di Era Rektor Al Makin

Salah satu problematika UIN Suka yang tak kunjung usai adalah kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diterapkan sejak 2014. Dalam lima tahun terakhir, nominal UKT terus merangkak naik. Rata-rata kenaikan UKT paling tinggi terjadi pada 2022, mencapai 23%. Sementara pada tahun 2024 ini, hasil analisis PusDa LPM ARENA menunjukkan bahwa nominal rata-rata seluruh golongan UKT naik di atas 2%. Kenaikan terbesar ada pada golongan 3 (3.6%) dan 7 (3.3%).

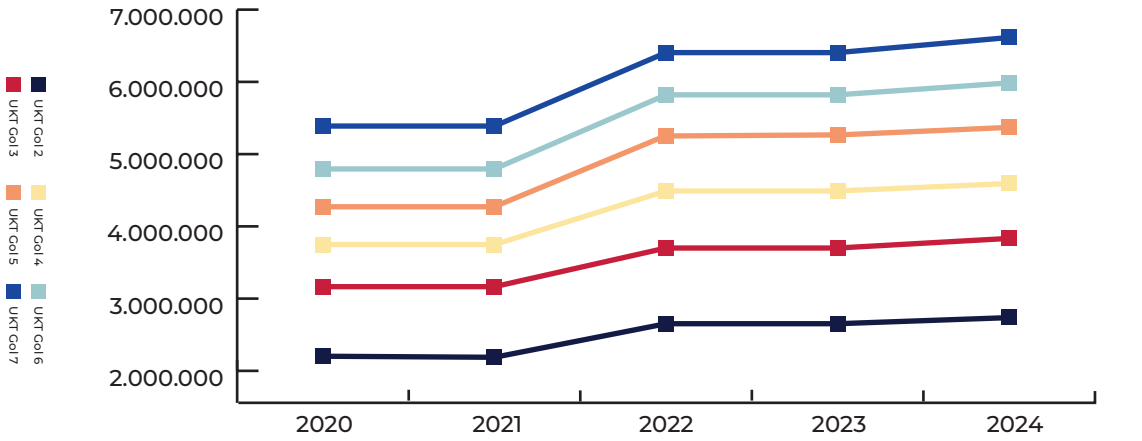

*hitungan rata-rata nominal UKT tahun 2024 sudah menyertakan 3 prodi baru yaitu Arsitektur, Studi Islam, dan Sains Biomedis

Prodi dengan Persentase Kenaikan UKT tertinggi 2024

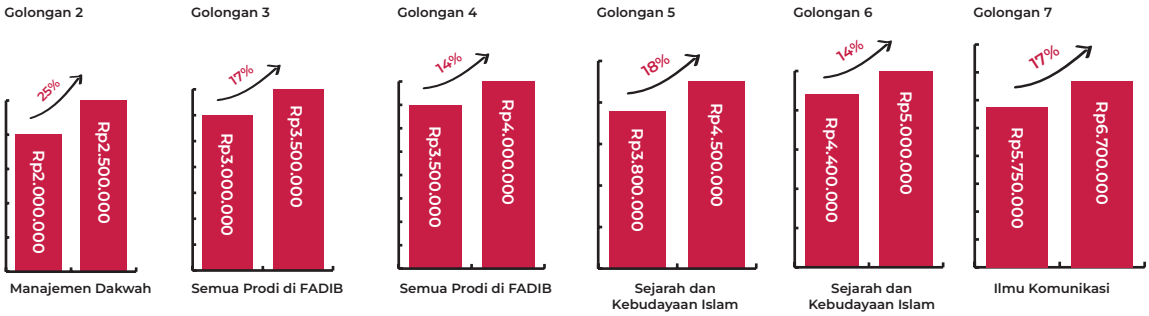

Seberapa Mahal Kuliah di UIN Suka?

Ilmu Hukum	Rp8.000.000,-
Teknik Industri	Rp8.500.000,-
Arsitektur	Rp8.500.000,-
Teknik Informatika	Rp9.000.000,-

Untuk menjawab pertanyaan itu, kami menyajikan empat program studi dengan UKT golongan VII termahal. Tidak transparannya unit *cost* membuat tidak begitu jelas mengapa keempat program studi ini memiliki UKT yang begitu mahal. Fakultas Saintek mendominasi tiga besar, dengan kejutan munculnya Program Studi Arsitektur yang notabene baru berdiri pada tahun 2023.

2020

Potongan UKT Ketika Pandemi

Al Makin menjabat ketika pandemi melanda dan perkuliahan berjalan secara daring sepenuhnya. Tapi tak ada potongan UKT untuk semua mahasiswa di tengah terpuruknya kondisi ekonomi.

Hingga aksi pada (04/02/2022) tuntutan potongan UKT bagi seluruh mahasiswa tak kunjung dipenuhi.

Aksi mahasiswa menuntut penundaan pembayaran dan potongan UKT pada (10/02/2021).

Padahal, fasilitas fisik tidak digunakan. Sementara subsidi kuota buat mahasiswa juga seret. Pada semester ganjil 2020/2021 itu, sebanyak 1591 mahasiswa mengambil cuti.

Kenaikan UKT Tertinggi

Tahun ajaran 2022-2023 menjadi tahun kenaikan UKT tertinggi selama lima tahun belakangan. Di golongan 5, kenaikan rata-ratanya mencapai 23% dari tahun sebelumnya.

Mahasiswa baru 2022 memprotes kenaikan UKT yang berakibat pembubaran PBAK, (18/08/2022).

Saat PBAK hari pertama, mahasiswa baru 2022-2023 melayangkan protes tentang mahalnya UKT. Lalu pada hari ketiga, PBAK dibubarkan oleh rektorat sebelum selesai, karena mereka mengindikasi adanya aksi lanjutan menolak UKT mahal dan pinjaman Dana Cita.

2024

Sanggah UKT untuk Mahasiswa Baru

Meminimalisir dampak UKT yang rawan tidak tepat sasaran, Sema-Dema mengajukan sistem sanggah bagi mahasiswa baru 2023-2024. Agar maba dapat meninjau ulang golongan UKT yang mereka dapatkan.

Aksi mahasiswa menuntut sistem sanggah UKT bagi mahasiswa baru, (15/08/2023).

Sayangnya, rektorat menolak sistem ini. Nahasnya, menurut survei Formal pada November 2023, lebih dari 88% mahasiswa UIN Suka mendapatkan UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonominya.

Diskusi Forum Mahasiswa Kalijaga (Formal) membahas UKT yang tidak tepat sasaran, (13/12/2023).

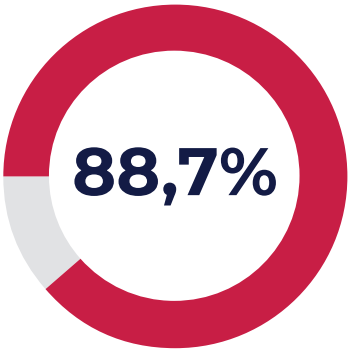

*Data berdasarkan hasil survei yang dilakukan Forum Mahasiswa Kalijaga (Formal) pada November 2023

Lalu, Apakah UKT yang didapatkan Mahasiswa Sesuai dengan Kondisi Ekonominya?

Singkatnya, sebagian besar mahasiswa justru mendapatkan nominal UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya. Sebanyak 88,7% mahasiswa mendapatkan UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonominya. Bahkan ada 20 mahasiswa yang penghasilan orang tuanya di bawah Rp. 500.000 per bulan mendapatkan UKT golongan V sampai VII.

Olah Data: PusDa ARENA
Grafis: Aji Bintang N.

Apa Kata Mereka soal Kampus di Era Rektor Al Makin?

Kalau Pak Makin, beliau lebih kaya gak pengen banyak ambil resiko. Jadi mahasiswa pun ya cuman kaya buih-buih saja gitu, tidak ada ledakan. Apa sih? lukisan? terus keren gitu jadi rektor seorang pelukis? Menurutku fungsimu rektor ya rektor. Kita tahu beliau itu seorang rektor yang pinter *ngelukis*.

Terus kemudian kadang-kadang keputusan tuh lucu-lucu lah. Kalau Pak Makin, aku lebih senang menjadikan beliau sosok yang humoris begitu. Jujur aja rektor yang kerap mengundang tawa atau apa, tanpa harus pake jokes, cukup dia "hehehe" gitu kita udah ketawa.

Ya itu Pak Makin lucu-lucu, jadi dari personalnya itu menurutku humoris, sampai *policy-policy* kebijakannya juga sangat humoris gitu. Jadi asik gitulah, asikin aja. Kalau dibikin pusing, ya kita terkecoh dong.

Noval
Ketua Forum Komunikasi UKM

Aku meng-*highlight* perihal bagaimana kebijakan-kebijakan aja, karena periode Prof. Makin ini ada banyak kebijakan-kebijakan yang itu kurang ideal.

Yang pertama, dia selalu kontroversial di PBAK. Yang kedua dari segi kebijakan Prof. Makin ini kurang melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan mahasiswanya.

Kemudian Prof. Makin ini tidak berani bersuara perihal bagaimana UKT. Jadi dia selalu menggunakan hierarkinya. Dipersulitnya kita mengakses ini-itu, karena menurut beliau mungkin sensitif. Karena memang perihal keuangan itu adalah kebebasan. Jadi perihal Prof. Makin juga itu memang selalu kontroversial dengan kebijakan-kebijakan. (Misalnya) pembubaran diskusi di periode kemarin, kebetulan itu ada berkolektif dengan Social Movement Institute juga dibubarkan.

Muhammad Rafli
Ketua Senat Mahasiswa UIN Suka 2023-2024

Rektor yang lama itu alhamdulillah aman dan memuaskan. Cuman ada yang kurang memuaskan, yaitu kurang melihat untuk mahasiswa internasional. Contohnya kemarin ada keluhan *pasal* IO (International Office) UIN karena tidak terlalu membantu kami. Soalnya kami sangat membutuhkan bantuan kerja dari IO. Karena IO kaya engga peduli. Mungkin kami sudah memberikan keluhan tersebut kepada rektor *and then* masih belum ada perubahan, sama sekali belum ada perubahan.

Mohd. Shah Asyraf bin Saidi
Mahasiswa Asing asal Malaysia Angkatan 2020

Apa Harapan Mereka untuk Rektor Baru?

Harapannya, kalau aku cukup sederhana, harus adanya pertimbangan 2 arah. Contohnya gini: akreditasi UIN Jogja memang bagus, tapi dari hal itu mahasiswa yang jadi korbannya, mulai dari UKT mahal sama mahasiswa susah untuk berkreasi di luar kampus. Selain itu, harapanku rektor selanjutnya lebih bisa merangkul mahasiswa dan terbuka terhadap mahasiswa sehingga dalam mengeluarkan kebijakan tidak ada pihak yang dirugikan.

Muhamad Nazarudin
Ketua HMPS Hukum Keluarga Islam 2024

(Harapannya) bisa tetap berjualan saja, karena dulu sempat ada relokasi yang membuat kesusahan mencari tempat berjualan. Tapi ya (meskipun) sekarang sudah ada jalan keluarnya.

Agun Sahbudin
Pedagang Kaki Lima

Rektor baru harus tau di UIN harus ada akses lengkap untuk difabel, selalu support untuk difabel. Ke depannya lebih baik jangan sampai diskriminasi karena difabel punya hak.

Maulida Nurlaila
Mahasiswa Difabel

Kalau bisa *yo* memperhatikan yang pegawai *outsourcing* seperti ini lah. Kita kan menjabat sebagai pekerja kan sebelum Pak Al Makin menjabat. Saya rasakan belum ada sama sekali pengaruhnya yang ke kita. Jadi belum ngerasain sama sekali. Mungkin itu pengaruhnya ke internalnya UIN sendiri ada, tapi kalau untuk *outsourcing* atau ke kita belum tahu gitu. Soalnya saya merasa ga ada bedanya. Tetep, kerjanya juga tetep sama gitu. Gaji sama, jam kerja juga sama. Kalau untuk aturan, gaji kan ikut kementerian. Jadi kalau ada kementrian mutusin naik gaji ya naik, kalau ga ya ga gitu.

Abu Zair
Tim Kebersihan Kampus

MELIHAT INFRASTRUKTUR KAMPUS MENDUNIA!

oleh **Ahmad Fauzi** &
Elang Mahardhika*

SEPERTI *OMON-OMON* yang dikicaukan terus, civitas kampus selalu bangga akan simbol akreditasi internasionalnya (padahal akreditasi bisa *diakalin*). Dari masa orientasi mahasiswa kerap kali telah disusupi oleh bisikan-bisikan seperti "kampus kita sudah berstandar internasional", "kampus kita salah satu kampus terbaik" dan bla bla bla bau lainnya. Hal-hal seperti ini kerap kali membius mahasiswa untuk kritis terhadap kondisi kampusnya yang sebetulnya (tidak) berstandar internasional.

Infrastruktur salah satu kecenderungan yang mendasar pemenuhan hak dasar hidup mahasiswa di kampus. Seperti halnya sandang, pangan, dan papan, infrastruktur menjadi pokok di mana belajar menjadi nyaman dan maksimal. Namun, nyatanya pemenuhan hak akan infrastruktur pendidikan di kampus kita ini masih meninggalkan banyak permasalahan.

Tiap hari di ruang kelas, ketika pembelajaran dimulai para mahasiswa harap-harap cemas saat presentasi. Bukan pada isi materinya, tapi pada proyektor yang digunakan dosen bisa tersambung dengan laptopnya atau tidak. **Tongkat**

sakti berstandar 'internasional' yang harus disiapkan untuk menghidupkan proyektor, pun kadang-kadang hilang. Tak heran beberapa dosen pun seringkali sarkas dengan menyebutkan prodi yang katanya terakreditasi FIBAA (Foundation of International Business Administration Accreditation) masih ribet dan awas menggunakan proyektor.

Tidak sampai di sini saja, suhu ruangan yang panas dan sumpek bercampur bau keringat teman sekelas masih menjadi alasan tertinggi atas ketidaknyamanan kegiatan belajar mengajar. *Air Conditioner* (AC) sudah tampak menguning dan tidak kuat lagi meniupkan kesegarannya. Toh, dirinya pun tidak segar. Alternatif lainnya ada kipas angin, tapi baling-balingnya justru tidak berputar.

Begitupun dengan bangku-bangku kelas yang *bodol*. Bangku-bangku yang sudah ditelanjangi kulit luarnya, hingga dalemannya kelihatan. Bahkan ini tidak hanya ditemukan di satu-dua kelas, namun hampir di setiap fakultas memiliki problematika yang sama. Kita perlu datang lebih awal untuk mendapat tempat duduk ideal, bersih, dan tak nampak coretan keresahan di bangkunya. Tak hanya bangku, pemandangan tembok-tembok luntur yang bersanding dengan gorden lusuh yang amat berdebu membawa mahasiswa pada suasana yang sangat mendukung untuk (tidak) belajar.

Dari hal-hal yang terdekat dengan kita di kelas masing-masing saja selalu ada masalah yang berlarut-larut dan tak pernah selesai.

Tongkat sakti berstandar internasional pun harus ditandai agar tidak hilang.

Pagar rusak yang sudah waktunya dipugar.

Bangku-bangku bodol yang masih digunakan kampus mendunia.

Tampak depan Gedung Kuliah Terpadu (GKT).

lebih dari 600 ribu view itu memberikan kenyataan yang lain. Mulai dari banyaknya *guiding block* (rambu jalan untuk difabel netra) banyak yang rusak. Salah satu mahasiswa difabel netra pun mengaku kesulitan menggunakan *guiding block* karena banyak sekali penghalang, seperti plang yang bisa mencederai kepala.

Yang tak kalah mengejutkan sebenarnya adalah pembangunan gedung-gedung baru yang katanya (dalam tiap berita acara) bisa menunjang fasilitas yang belum memadai. Gedung Kuliah terpadu atau biasa disingkat GKT. Proyek besar layaknya epos Roro Jonggrang (dibangun dalam waktu pendek) dibangun dengan harapan memenuhi kekurangan fasilitas. Dan selayaknya harapan gedung ini perlu mengorbankan beberapa hal, salah satunya parkiran terpadu kampus barat. Bisa kita lihat sekarang ini betapa padatnya parkiran penutup jalan di depan Fakultas Tarbiyah dan Syariah.

Akreditasi internasional terkesan hanya sebatas bualan semata. Apapun problematika yang dialami selalu ditutup dengan "kita berstandar INTERNASIONAL". Kalimat itu tak ubahnya seperti pemberitahuan "dilarang membuang sampah di sini!" di tempat pembuangan akhir, hanya simbol.

Mari kita menengok permasalahan infrastruktur lainnya. Beberapa bulan yang lalu ***ARENA*** membuat sebuah konten video di instagram dengan tema menyoroti fasilitas kampus yang ramah disabilitas. Dengan predikat kampus ramah difabel UIN Suka menggalakkan segala fasilitas di kampusnya harus aksesibel untuk para penyandang disabilitas.

Namun, dalam konten yang telah ditonton

Ini menjadi semakin ironi mengingat predikat kampus inklusif sudah ada sejak lama disandang UIN Suka. Penyandangan atau lebih tepatnya '*self claiming*' tersebut terkesan hanya sekedar bualan kosong yang membumbung tinggi terus menerus, sampai mereka lupa bahwa itu tidak nyata. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan atensi berlebih dari pihak luar. Caper, cari perhatian.

Alih-alih membangun fasilitas yang layak untuk label inklusif, justru poster dan pamflet inklusif yang berlogo UIN Sunan Kalijaga lebih banyak bertebaran di jalan-jalan atau di media sosial. Dasar manusia-manusia *postmo* yang hanya bergelut dengan bahasa! Jika

Simbol jalur difabel yang tak terawat.

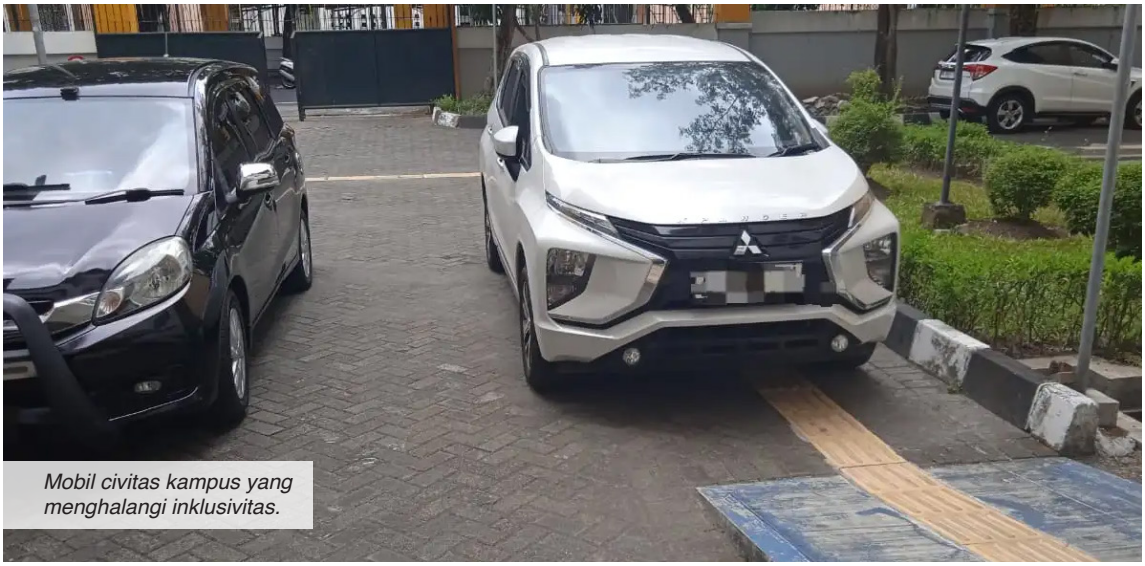

Mobil civitas kampus yang menghalangi inklusivitas.

Derrida tau soal ini, pasti akan diberikan kuliah dekonstruksi empat SKS.

Masalah perparkiran juga tidak kalah runyamnya. Kalian bisa bayangkan suasana pasar tradisional yang berada tepat di pinggir jalan ketika di pagi hari, sumpek bukan? Nah begitu pula suasana parkiran kampus di UIN Sunan Kalijaga. Sungguh kalimat ini bukan sebuah kiasan majas hiperbola.

Batas-batas parkir kian diabaikan karena sebegitu minimnya parkiran yang disediakan. Ada pula motor-motor mahasiswa yang menghalangi laju *guiding block*, mungkin mereka menyangka itu merupakan garis pembatas parkiran. *Agent of change-agent of change* (dibaca dengan nada Mas Anies-Mas Anies).

Eittss, tidak hanya mahasiswa rupanya. Para dosen dan guru besar pun yang sudah menempuh pendidikan tinggi sampai namanya tertutupi oleh gelar-gelarnya pun tidak mengetahui bahwa *guiding block* bukanlah garis parkir. Mungkin pikiran mereka penuh akan kajian-kajian yang muluk-muluk sampai masalah aplikatif kecil seperti ini dihiraukan.

Permasalahan lahan parkir yang seperti ini tidaklah perlu dilihat secara teoritis menggunakan hitung-hitungan ala dishub. Secara kasat mata pun parkiran yang brutal telah berbicara kepada para mahasiswa bahwa "**kami tidak layak pakai!**".

Dengan banyaknya masalah infrastruktur ini, kepada siapa kita sebenarnya berharap, atau dari berharap saja kita sudah tidak bisa. Toh, kebijakan pembangunan selalu tiba-tiba ada. Problem ini sebenarnya bisa jadi salah satu pandangan kita dalam melihat junjungan rektorat. Silih berganti, kalau kata orang mengenai demokrasi, pandangan ini diperlukan untuk bahan timbangan. []

**Keduanya orang yang susah jika disuruh bikin kiasan yang masuk akal.*

Kondisi parkiran ketika jam aktif perkuliahan.

PENJARA MITOS DI ERA AL MAKIN

oleh **Selo Rasyd Suyudi***

SEPERTI IKLAN SALAH SATU MERK KECAP, mitos dirawat seperti anak sendiri. Mitos dijaga dan dikeloni setiap hari. Tumbuh besar dan berguna adalah harapan orang tuanya. Berguna? Entah buat siapa, jelas buat apa.

Saya kuliah filsafat di UIN Sunan Kalijaga, atau lebih tepatnya Aqidah dan Filsafat Islam—gelarnya S.Ag *btw*. Pelajaran pertama di kelas adalah soal mitos. Kata dosen, mula-mula adalah mitos, yang berguna dalam upaya memahami jagat semesta luas, yang pada saat itu bernalar diyakini belum mumpuni untuk menjangkaunya. Jadi semuanya disandarkan pada yang tak kasat mata. Kemudian barulah *logos* atau pengetahuan.

Takhayul atau mitos selalu menjadi

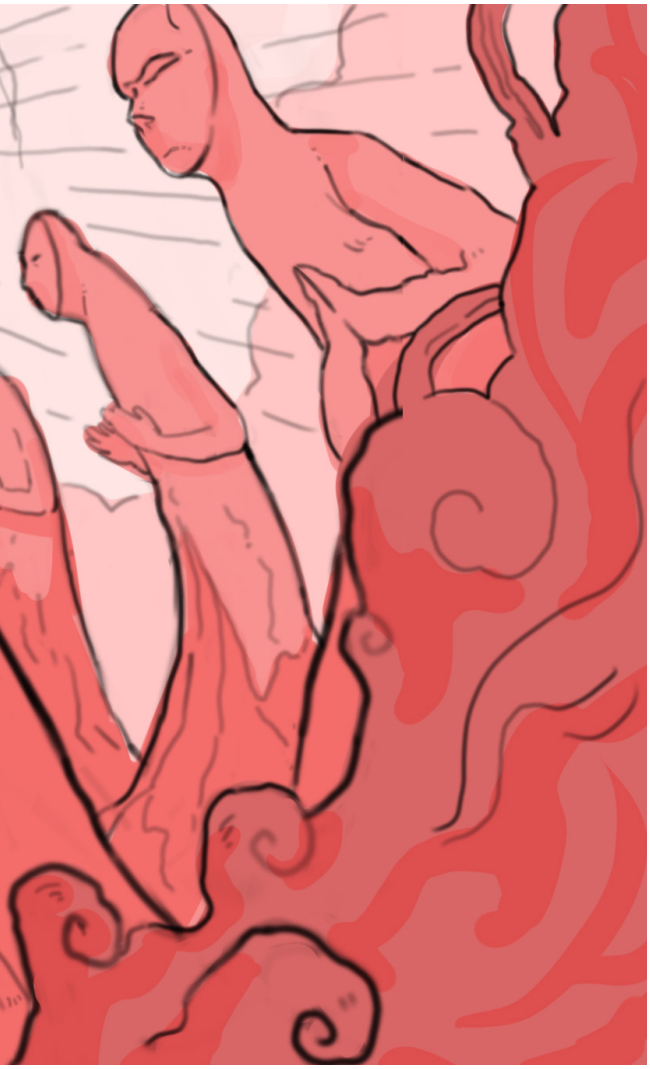

perbincangan hangat, di Indonesia khususnya. Jika pun bukan sebagai objek pem-*bidah*-an dan *ceng-cengan* para positivis seperti August Comte atau para penganut keluhuran logika macam orang-orang modern, mitos sedikit banyak menyimpan keluhuran serta sarat akan pembelajaran, dan tak jarang menjaga dari manusia rakus kayak kapitalisme.

Untuk tujuan yang terakhir: menjaga alam, saya teringat kearifan lokal masyarakat Baduy yakni *Leuweung Kolot* (hutan orang tua). Konsepsinya mirip-mirip dengan hutan lindung. Masyarakat sekitar meyakini jika kekuatan leluhur hadir pada alam, kemudian memuja leluhur merupakan cara memberkati atau merawat alam. Dengan begitu tempat kelahiran mereka yang lestari terhindar dari tangan-tangan orang rakus.

Dalam bentuknya yang lain, mitos mudah sekali dijumpai dengan beragam model berbeda. Ada yang larangan (pamali), budaya, begitu pula lisan, cerita atau hikayat. Anda mungkin khatam dengan dongeng Malin Kundang, Bawang Merah dan Bawang Putih, hingga Sangkuriang yang direpresentasikan sebagai asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Semuanya adalah mitos, karangan. Dan sebagaimana karangan pada umumnya, pasti memiliki maksud tertentu. Ada makna yang sedang dibangun.

Kita ambil contoh yang pertama, Malin Kundang diproduksi melalui tutur (oral) turun-temurun dengan latar Sumatra Barat. Premis ceritanya sederhana, Malin adalah orang miskin dan beranjak dewasa ia pergi merantau. Singkat cerita ia menikah di nun tanah seberang tersebut lalu segera pulang.

Konflik terjadi setelah ia pulang sekitar tujuh tahun kemudian. Sewaktu mendarat di pulau kelahirannya ia tidak menganggap orang tua yang lusuh nan dekil di hadapannya tersebut sebagai ibunya. Jelas ibunya sakit hati dipandang *macam tu*, akhirnya Ibu Malin, Sari Mayang, mengutuk ia menjadi batu. “Kukutuk kau jadi batu,” katanya sambil menangis. Frasa yang amat terkenal, sampai-sampai salah satu jenama mengadaptasinya di iklan mereka.

Pesan moralnya adalah larangan durhaka pada orang tua *wabil khusus* ibu, “nanti jadi batu,” pikir saya waktu masih bayi jagung.

Dalam pengertian ini, yaitu cara menyampaikan pesan dan bukan bentuk pesannya itu sendiri, Roland Barthes mengemukakan bahwa konsepsi mitos sendiri tidak bergerak dari ruang kosong. Artinya selalu ada motivasi di baliknya, di mana mitos berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam penyebaran ideologi, selain memberikan afirmasi terhadap nilai-nilai dominan tentunya, meski acap kali dalam keadaan lain maknanya seringkali mengalami pelintiran.

Lewat analisis semiotiknya itu, Barthes memberitahu bahwa kita senantiasa bisa mencecah kata, slogan, teks atau apapun itu

dalam lingkup bahasa dan budaya yang ia sebut sebagai tanda (*sign*), menjadi pecahan kecil penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*), kemudian menemukan makna terselubung (konotasi) di tanda tersebut.

Teori ini sendiri merupakan pengembangan dari pendahulunya yakni Ferdinand De Saussure yang mengkaji makna denotatif. Lalu beliau kemudian mengembangkan teori semiotika ini menjadi dua tingkat pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi.

Denotasi sendiri berarti merupakan hubungan antara penanda dan petanda di sekitar kita, yang memunculkan makna eksplisit. Sedangkan konotasi dimaknai sebagai hubungan petanda dan penanda ini berbenturan dengan berbagai macam hal, seperti kultur, emosi, pengetahuan, dan lain sebagainya, yang dengan begitu maknanya sendiri hadir secara implisit atau tersembunyi.

Di sini, konotasi sendiri bagi Barthes identik dengan penanaman ideologi, atau apa yang ia sebut sebagai mitos yang berguna seperti sudah disinggung sebelumnya. Sederhananya, meminjam bahasa seorang kawan "ada sesuatu yang sedang dibangun," yang tentunya sesuatu itu (dengan tanda petik) seringkali tidak mengenakkan khalayak ramai.

Untuk yang terakhir ini, bikin saya teringat kata-kata yang sering banget *diungkapin* UIN Sunan Kalijaga, entah oleh Rektor ataupun dalam bentuk pamflet. Saya kira semua orang mafhum dan mungkin *ngeh* bahwa frasa yang dimaksud adalah kampus unggul, cinta ilmu, hormat guru, *akhlaqul karimah*, masa depan cerah, hidup berkah–yang semua ini kita kenal sebagai enam nilai UIN Suka. Lalu ditambah satu lagi: UIN Suka untuk bangsa-UIN Suka Mendunia.

Jika mau dicurigai lebih dalam, tentu penciptaan slogan ini bukan cuman sebagai representasi dari kampus semata, bahwa kampus seperti ini dan begini. Tidak. Tapi juga memiliki arti 'Anda harus begini'. Artinya, ada pendiktean di sana. Tentu bakalan mudah dibayangkan di kampus di mana keilmiahan dijunjung tinggi dan perdebatan adalah suatu hal yang sehat, terjadi peredaman dengan istilah-istilah normatif seperti cinta ilmu dan tetek bengek lainnya.

Kata-kata mutiara ini sedikit banyak juga sering disosialisasikan di acara-acara kampus. Upaya-upaya buat meredam suara mahasiswa ini diselingi juga dengan usaha yang lain, misalkan seperti yang diceritakan salah seorang maba kepada saya, dengan iming-iming perlunya mahasiswa lulus cepat dan menghindari demo.

Melihat intrik dari pernyataan tersebut, tentu cukup mudah, mahasiswa akan dibenturkan dengan kenyataan bahwa mahasiswa banyak yang masih dibiayai kuliahnya oleh orang tua, dan dengan begitu lulus cepat memiliki arti sama dengan berbakti kepada ibu-bapak. Dan larangan demo ingin ditanamkan maknanya kepada mahasiswa sebagai buang-buang waktu, bukan menyampaikan pendapat.

Meski acap kali dianggap ketinggalan zaman, dan penggunaannya tidak relevan di kiwari, justru orang-orang sekarang menganut mitos itu sendiri dengan bentuk dan pengertiannya yang baru. Alih-alih memiliki makna luhur, mitos acap kali juga digunakan demi kuasa. Kata kuncinya adalah produksi mitos dilakukan guna menggembosi seseorang, kelompok, dan buat mengaburkan fakta di baliknya.

Mitos menjadi salah satu cara yang terbukti ampuh dalam menaklukan "kenakalan" seseorang, termasuk yang dilakukan Mama pada saya. Mama sering melarang saya dengan iring-iringan mitos yang menyertainya, "jangan keluar maghrib, nanti diculik Wewe Gombel," atau "jangan duduk di pintu, nanti susah jodoh," keduanya dikatakan dalam bahasa Sunda yang kental berikut logat khas. Tentu selanjutnya terjadi adalah saya yang menuruti, meski jelas tak dipungkiri pembelotanlah yang sering terjadi.

Mula-mula adalah mitos, kemudian *logos*, tapi kapan hal itu terjadi di UIN Sunan Kalijaga? []

**Seorang yang takut masa tuanya macam Gregor Samsa, lebih sering tidur dan melamun.*

“Sluman,
Slumun,
Slamet.”

SELAMAT DATANG

di Zona Ketidaknyamanan

Anggota Baru LPM ARENA

Ahmad Hidayat Pasaribu | Bachtiar Yusuf | Ghulam Ribath Ma’arif | Khirza Zubadil Ashrof | M. Zilman Nadzif | Mukhamad Aldi | Nona Nikmawati Asrul | Ridwan Maulana | Rizki Fauzan | Rizqina Aida | Sadrah Tawang Mahari | Siti Hajar Fauziah | Syifa Nurhidayah | Wilda Khairunnisa | Wildan Humaidyi

“Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin,”

Gus Dur

Hak Cipta milik
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) ARENA
2024